

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

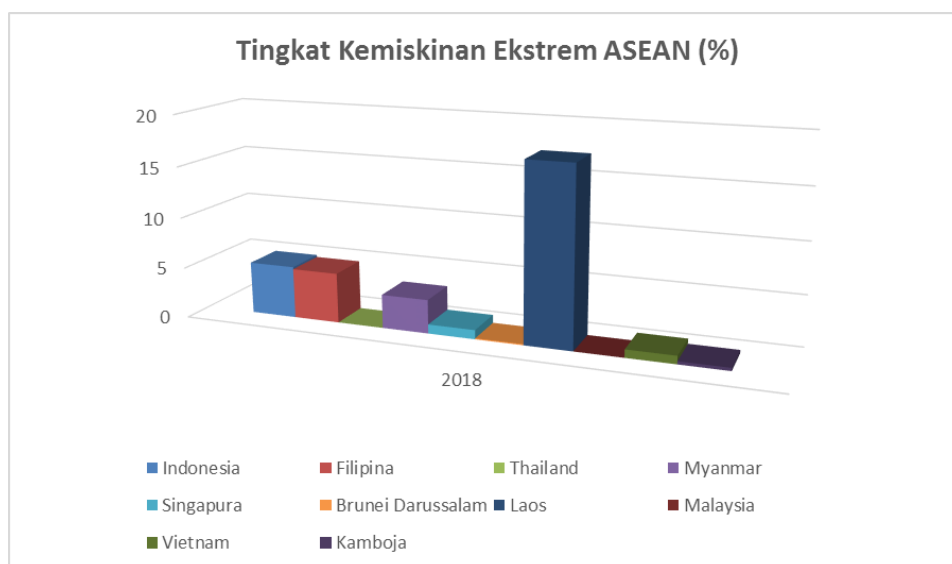
Sampai dengan akhir abad 20 kemiskinan masih menjadi beban dunia. Nampaknya isu kemiskinan akan terus menjadi persoalan yang tidak akan pernah hilang di dunia ini. Dunia meresponnya dengan menyepakati suatu pertemuan pada September 2000 yang diikuti oleh 189 negara dengan mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan *The Millenium Development Goals* (MDG's). Salah satu targetnya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin sehingga 50% pada tahun 2015. Deklarasi ini memberikan indikasi bahwa masalah kemiskinan masih menjadi masalah besar dunia yang harus ditanggulangi Bersama.

Dengan berakhirnya era MDGs yang berhasil mengurangi penduduk miskin dunia hamper setengahnya, selanjutnya saat ini memasuki era SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang dimulai dengan pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 September 2015 di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), New York, Amerika Serikat. Acara tersebut merupakan kegiatan seremoni pengesahan dokumen SDGs yang dihadiri perwakilan dari 193 negara.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah program pembangunan berskala dunia yang sifatnya universal, tanpa mendikotomikan antara negara berkembang dan negara maju. Tujuan daripada SDGs ini adalah “*No Poverty*” atau ingin menghilangkan kemiskinan. Kemiskinan sendiri mampu

menciptakan permasalahan sosial baru dalam kehidupan dan negara. Sebagai bagian dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Indonesia termasuk salah satu negara yang berkomitmen untuk mengentaskan persoalan kemiskinan ini.

Bagi negara Indonesia, kemiskinan masih menjadi permasalahan utama dan beban berat bagi setiap pemerintahan, terutama jika dikaitkan dengan kesenjangan yang semakin melebar antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Itu artinya Indonesia juga dituntut mewujudkan target-target yang ditetapkan dalam deklarasi PBB tersebut. Di Indonesia penanggulangan kemiskinan telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Upaya Indonesia ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah yang serius.



Sumber: World Data Lab

Gambar 1. 1
Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Beberapa Negara di ASEAN Desember 2018

Menurut Abdul Halim Iskandar (Mendes PDDT) menyatakan bahwa warga miskin ekstrem terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Warga miskin yang memiliki hamper seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan.
2. Warga miskin ekstrem yang masih dimungkinkan dapat melakukan aktualisasi diri untuk bertahap hidup.

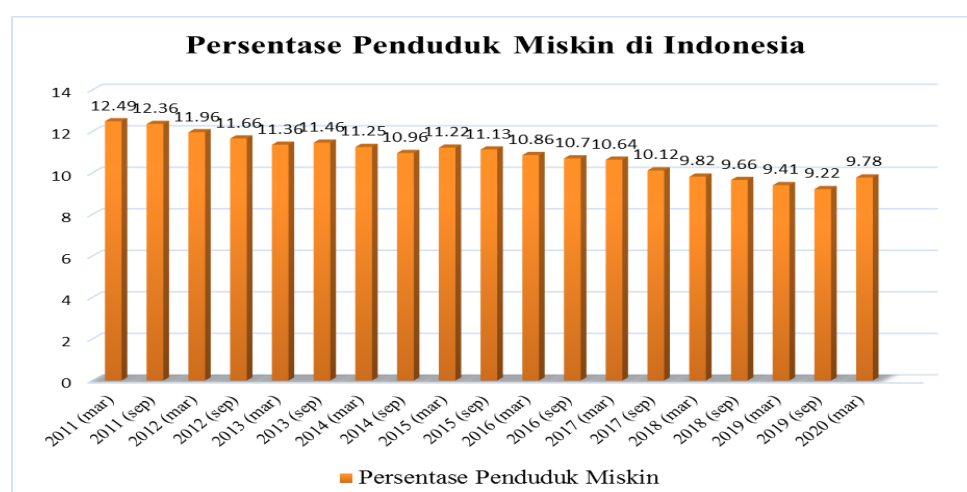
Kedua kategori tersebut dibagi menjadi beberapa ciri seperti lansia, tinggal sendiri, tidak bekerja, difabel, memiliki penyakit kronis/menahun, ruah tidak layak huni, tidak memiliki fasilitas air bersih dan sanitasi yang memadai, itu termasuk kedalam kategori kompleksitas multidimensi kemiskinan. Sedangkan, seperti usia sekitar 15 – 64 tahun, tidak memiliki penyakit menahun, dan bukan golongan difabel mereka termasuk kedalam kategori aktualisasi diri untuk bertahan hidup.

Pada Gambar 1.1 Laos menjadi negara di ASEAN dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinnggi, lalu negara Indonesia berada di peringkat kedua, dan di peringkat ketiga yaitu negara Filipina. Dalam hitungan global, jumlah penduduk dunia yang berada dalam status kemiskinan ekstrem mencapai 606 juta jiwa atau 8% penduduk dunia. Angka ini cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dilansir dari laman *Asian Correspondennt* menunjukkan pada 10 negara ASEAN telah membuat kemajuan signifikan dalam urusan pemberantasan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Meskipun begitu, sekitar 36 juta orang yang

hidup dibawah garis kemiskinan, 90% nya berada di negara Indonesia dan Filipina.

Pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4% atau sebesar 10,86 juta jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari 10 negara ASEAN sudah jelas bahwa Indonesia masih memiliki tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Pada hitungan global jumlah penduduk dunia yang berada dalam status kemiskinan mencapai 9,41% dari total keseluruhan penduduk di Indonesia atau sebesar 26,42 juta orang. Meningkatnya jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tertentu dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan adanya pandemic Covid-19 dimulai pada bulan Maret 2020. Perkembangan tingkat kemiskinan Indonesia 2011 sampai dengan Maret 2020 disajikan pada Gambar 1.2, dan menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan walaupun tidak signifikan.



Sumber: Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 1. 2 Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 2011-2020

Tabel 1. 1
Persentase Kemiskinan di Setiap Provinsi di Indonesia

PROVINSI	2010 (Tahunan)	2020 (Semester I Maret)
ACEH	20.98	14.99
SUMATERA UTARA	11.31	8.75
SUMATERA BARAT	9.5	6.28
RIAU	8.65	6.82
JAMBI	8.34	7.58
SUMATERA SELATAN	15.47	12.66
BENGGKULU	18.3	15.03
LAMPUNG	18.94	12.34
KEP. BANGKA BELITUNG	6.51	4.53
KEP. RIAU	8.05	5.92
DKI JAKARTA	3.48	4.53
JAWA BARAT	11.27	7.88
JAWA TENGAH	16.56	11.41
DI YOGYAKARTA	16.83	12.28
JAWA TIMUR	15.26	11.09
BANTEN	7.16	5.92
BALI	4.88	3.78
NUSA TENGGARA BARAT	21.55	13.97
NUSA TENGGARA TIMUR	23.03	20.9
KALIMANTAN BARAT	9.02	7.17
KALIMANTAN TENGAH	6.77	4.82
KALIMANTAN SELATAN	5.21	4.38
KALIMANTAN TIMUR	7.66	6.1
KALIMANTAN UTARA	-	6.8
SULAWESI UTARA	9.1	7.62
SULAWESI TENGAH	18.07	12.92
SULAWESI SELATAN	11.6	8.72
SULAWESI TENGGARA	17.05	11
GORONTALO	23.19	15.22
SULAWESI BARAT	13.58	10.87
MALUKU	27.74	17.44
MALUKU UTARA	9.42	6.78
PAPUA BARAT	34.88	21.37
PAPUA	36.8	26.64
INDONESIA	13.33	9.78

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki persentase tingkat kemiskinan yang tinggi dan juga memiliki rata-rata pengeluaran per bulan dibawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik dari 34 Provinsi lainnya di Indonesia. Berdasarkan table 1.1 juga tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan pada periode 2010-2020. Pada tahun 2010 persentase kemiskinan Indonesia sebesar 13,33% mengalami penurunan pada setiap provinsi hingga pada tahun 2020 persentase kemiskinan Indonesia sebesar 9,78%.

Persentase kemiskinan yang paling kecil berada di Pulau Kalimantan dengan rata-rata sebesar 5,85% di tahun 2020. Dan Provinsi Bali sebesar 3,78% di tahun 2020. Kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka akan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Keparahan kemiskinan merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks kemiskinan maka akan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin.

Selain itu tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Dengan berdasarkan teori lingkaran kemiskinan tersebut dapat diketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan diantaranya tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan besarnya konsumsi. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dan kajian mengenai sebab-sebab kemiskinan menjadi instrumen penting bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada

kondisi hidup orang miskin. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mengentas kemiskinan baik di negara Indonesia atau negara manapun dalam jangka panjang. Baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas pekerja yang berpendidikan dan pada waktunya akan meningkatkan pendapatan mereka (Arsyad, 2010). Berikut data tingkat Pendidikan pekerja strata SMA ke atas:

Tabel 1. 2
Jumlah Pekerja Berpendidikan SMA Keatas Tahun 2016-2020
Beberapa Provinsi di Indonesia (jiwa/tahun)

PROVINSI	2016	2017	2018	2019	2020
Aceh	654281	635194	628627	708026	713963
Sumatera Utara	1530534	1765114	1922862	1968879	1941623
DKI Jakarta	2401310	2350785	2377830	2395225	2169442
Jawa Barat	5839695	6186521	6469826	6601229	6062616
Jawa Timur	4445476	4637379	4676419	4901544	4677594
Nusa Tenggara Barat	485753	464790	475805	551895	552732
Kalimantan Timur	592132	643621	667132	691533	631828
Sulawesi Selatan	860212	890852	941121	1030217	976407
Maluku Utara	134995	136537	132758	154500	151698
Papua	266786	293544	307664	308503	282571

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dalam periode 5 tahun ke belakang provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan pekerja berpendidikan SMA keatas tertinggi dengan jumlah pekerja sebesar 6.601.229 jiwa pada tahun 2019, selanjutnya disusul oleh provinsi Jawa Timur di tahun yang sama tahun 2019 jumlah pekerja dengan pendidikan SMA keatas sebesar 4.901.544 jiwa. Sedangkan untuk

provinsi Maluku Utara pada tahun 2016 jumlah pekerja berpendidikan SMA keatas hanya sebesar 134.995 jiwa namun di tahun berikutnya mengalami peningkatan. Dengan demikian dapat kita asumsikan melihat data diatas angka pekerja berpendidikan SMA ke atas dari setiap provinsi selalu mengalami peningkatan

Masyarakat sudah mulai terbuka dengan tingkatan pendidikan karena memang menjadi salah satu instrumen paling kuat yang dimiliki masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan. Secara langsung, peran pendidikan adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan, sehingga meningkatkan produktivitas dan menciptakan akses ke lapangan kerja. Dengan demikian, penghasilan yang didapat akan dapat digunakan dalam membantu mengurangi kemiskinan, serta kelaparan. Secara tidak langsung, peran pendidikan dapat mencakup banyak bidang kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi, kesetaraan gender, kesehatan ibu, dan pengembangan keterampilan (Weiss, 1995; Oxaal, 1997).

Laju pertumbuhan ekonomi juga menjadi instrument penting. Karna, semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka menggambarkan bahwa semakin meningkat pula produksi suatu wilayah tersebut, tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya, hal ini akan membuat masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cepat. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan

kemakmuran masyarakat (Sukirno,1994). Maka laju pertumbuhan ekonomi memang menjadi instrumen yang sangat penting untuk pengambilan suatu kebijakan serta juga sangat berdampak pada tingkat kemiskinan disuatu daerah maka berikut ini laju pertumbuhan 10 provinsi di Indonesia:

Tabel 1. 3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Provinsi
Menurut ADHK (persen)

PROVINSI	2016	2017	2018	2019	2020
Aceh	1.38	2.31	2.79	3.45	0.71
Sumatera Utara	3.94	3.95	4.06	3.61	-1.84
DKI Jakarta	4.84	5.21	5.16	5.46	-2.7
Jawa Barat	4.17	3.89	4.25	4.3	-0.77
Jawa Timur	4.96	4.87	4.92	4.88	-4.39
Nusa Tenggara Barat	4.5	-1.11	-5.61	1.1	-3.49
Kalimantan Tengah	4.05	4.47	3.43	6.53	-1.91
Sulawesi Tengah	8.24	5.49	18.83	7.7	7.13
Maluku Utara	3.67	5.59	5.82	5.99	1.77
Papua	7.17	2.78	5.47	-16.36	-20.13

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Dapat dilihat dari tabel 1.3 diatas rata-rata pada setiap provinsi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, pencapaian laju ekonomi tertinggi adalah provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2018 yaitu sebesar 18.83% di tahun selanjutnya turun diangka 7.7%. Sedangkan pada tahun 2020 ketika wabah covid-19 melanda provinsi Sulawesi Tengah masih dapat bertahan ketika provinsi lainnya mengalami laju pertumbuhan ekonomi negatif, provinsi papua sebesar -20.13% dengan kondisi seperti ini dapat berpengaruh kepada jumlah penduduk miskin dimana ketika laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah menurun atau bahkan

mengalami defisit maka dapat berdampak dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Menurut Todaro (2011:101) pemerintah di negara manapun dapat segera jatuh atau bangun berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapainya dalam catatan statistik nasional. Berhasil tidaknya program-program di negara-negara dunia ketiga sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat output dan pendapatan nasional.

Selanjutnya, laju jumlah penduduk juga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu daerah atau wilayah. Hal ini dapat terjadi ketika pertumbuhan penduduk yang tidak dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia baik. Apabila kualitas sumber daya manusia yang rendah maka akan semakin sempitnya lapangan pekerjaan akan membuat tingkat kemiskinan akan meningkat. Berikut ini adalah laju pertumbuhan penduduk Indonesia:

Tabel 1. 4
Jumlah Penduduk di 33 Provinsi Indonesia (ribu jiwa)

PROVINSI	2011	2019
ACEH	4619033	5371532
SUMATERA UTARA	13220936	14562549
SUMATERA BARAT	4933112	5441197
RIAU	5726241	6971745
JAMBI	3167578	3624579
SUMATERA SELATAN	7598529	8470683
BENGKULU	1742080	2001578
LAMPUNG	7735914	8447737
KEP. BANGKA BELITUNG	1258234	1488792
KEP. RIAU	5726241	6971745
DKI JAKARTA	9752.1	10557.8
JAWA BARAT	43938796	49316712
JAWA TENGAH	32725378	34718204

PROVINSI	2011	2019
DI YOGYAKARTA	3509997	3868588
JAWA TIMUR	37840657	39698631
BANTEN	11005518	12927316
BALI	3957.6	4362.1
NUSA TENGGARA BARAT	4545650	5070385
NUSA TENGGARA TIMUR	4788618	5456203
KALIMANTAN BARAT	4477348	5069127
KALIMANTAN TENGAH	2249146	2714859
KALIMANTAN SELATAN	3714340	4244096
KALIMANTAN TIMUR	3123369	3721389
SULAWESI UTARA	2305924	2506981
SULAWESI TENGAH	2692.82	3054.02
SULAWESI SELATAN	8115638	8851240
SULAWESI TENGGARA	2294392	2704737
GORONTALO	1062561	1202631
SULAWESI BARAT	1189203	1380256
MALUKU	1570657	1802870
MALUKU UTARA	1063117	1255771
PAPUA BARAT	785979	959617
PAPUA	2915263	3379302

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Jika dilihat tabel 1.4 diatas jumlah penduduk di 33 Provinsi Indonesia dari berdasarkan survei penduduk yang di lakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami kenaikan tetapi tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menekan laju pertumbuhan penduduk lewat program keluarga berencana yang dilakukan sejak 1980. Hal ini berarti salah satu titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin. (Simatupang, 2003). Ketika negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan namun dengan diikuti angka kemiskinan menurun, maka dengan demikian bisa dikatakan berhasil dalam membangun negara secara sejahtera.

Permasalahan kemiskinan menjadi permasalahan yang sampai saat ini belum bisa diatasi terutama di negara Indonesia. Kemiskinan yang terjadi di negara Indonesia masih terbilang cukup besar karena kurang meratanya pembangunan pada setiap provinsi-provinsi di Indonesia. Maka dari permasalahan di atas peneliti ingin meneliti tentang **“Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Dengan Penduduk Miskin di Provinsi-Provinsi Indonesia Periode 2011-2020”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan jumlah penduduk miskin, jumlah pekerja berpendidikan SMA keatas, penerimaan daerah, LPE, dan jumlah penduduk di provinsi-provinsi Indonesia tahun 2011-2020?
2. Bagaimana pengaruh jumlah pekerja berpendidikan SMA keatas, penerimaan daerah, LPE, dan jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi-provinsi Indonesia tahun 2011-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, adapun tujuan penelitian yang diemban oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk miskin, jumlah pekerja berpendidikan SMA ke atas, penerimaan daerah, LPE, dan jumlah penduduk di provinsi-provinsi Indonesia tahun 2011-2020.

2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pekerja berpendidikan SMA ke atas, penerimaan daerah, LPE, dan jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi-provinsi Indonesia tahun 2011-2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam ilmu pengetahuan khususnya pada kajian ilmu ekonomi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi-provinsi Indonesia, dan penelitian ini bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya khususnya Universitas Pasundan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai penambah ilmu pengetahuan terutama bidang perekonomian serta dapat memahami dan mengetahui hasil dari faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi-provinsi Indonesia periode 2011 – 2020.

b. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi atau acuan bagi para pembaca khususnya pada faktor-faktor yang mempengaruhi

kemiskinan dan sebagai referensi bagi semua pihak yang membutuhkan terutama mahasiswa/i Universitas Pasundan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini dibutuhkan teori-teori yang relevan terkait dengan analisis hubungan faktor-faktor ekonomi dengan kemiskinan di provinsi-provinsi Indonesia periode 2011-2020.

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (2000) merupakan keadaan dimana seseorang individu atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dan memiliki standar tertentu. Penghasilan untuk biaya hidup layak yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik pada 2012 yaitu sebesar Rp.355,740.00/bulan, dengan kata lain setiap orang memiliki penghasilan sebesar Rp.11,000.00/hari. Penduduk yang memiliki penghasilan di bawah standar yang telah ditentukan oleh Badan Pusat Statistik dianggap sebagai penduduk miskin.

Suparlan (2000) mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah keadaan serba kekurangan harta dan benda berharga yang diderita oleh seorang atau sekelompok orang yang hidup dalam lingkungan serba miskin atau kekurangan modal, baik dalam pengertian uang, pengetahuan, kekuatan sosial, politik, hukum, maupun akses terhadap fasilitas pelayanan umum, kesempatan berusaha dan bekerja.

Robert Chamber (2010) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi sedangkan kelima dimensi tersebut membentuk suatu perangkap kemiskinan (*deprivation trap*), yaitu (1) kemiskinan itu sendiri, (2) ketidakberdayaan (*powerless*), (3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), (4) ketergantungan (*dependency*), dan (5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Kemiskinan menjadi salah satu penyakit dalam perekonomian suatu negara, terlebih lagi pada negara-negara yang masih berkembang dimana masalah kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensional. Kemiskinan bersifat kompleks artinya kemiskinan tidak muncul secara mendadak, namun memiliki latar belakang yang cukup panjang dan rumit sehingga sulit untuk mengetahui akar dari masalah kemiskinan itu sendiri, sedangkan kemiskinan bersifat multidimensional artinya melihat dari banyaknya kebutuhan manusia yang bermacam-macam.

Kemiskinan pun memiliki aspek primer berupa kemiskinan akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan, serta aset sekunder berupa kemiskinan akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Sebagai dampak dari sifat kemiskinan tersebut tergambar dalam bentuk kekurangan gizi, air, dan perumahan yang tidak sesuai, pelayanan kesehatan yang kurang baik, serta rendahnya tingkat pendidikan.

Ragnar Nurkse (1953) dalam Mudrajat Kuncoro (1997) membagi kemiskinan secara sederhana dan umum menjadi beberapa ukuran:

1. Kemiskinan Mutlak: Individu atau kelompok yang termasuk dalam ukuran kemiskinan mutlak apabila memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Ukuran ini digunakan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk melangsungkan hidup.
2. Kemiskinan Relatif: Individu atau kelompok yang termasuk dalam ukuran kemiskinan relatif apabila kebutuhan dasarnya telah terpenuhi, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan ukuran ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan apabila tingkat hidup masyarakat berubah, sehingga pengukuran kemiskinan relatif bersifat dinamis atau akan selalu ada.
3. Kemiskinan Kultural: Individu atau kelompok yang termasuk dalam ukuran kemiskinan kultural apabila individu atau kelompok tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain maupun ada peluang, dengan kata lain individu atau kelompok tersebut miskin karena sikapnya sendiri, yaitu pemalas dan tidak ada usaha untuk memperbaiki kehidupannya ke kondisi yang lebih baik.

2.1.2 Pendidikan sebagai Sumber Daya Manusia

Tingkat pendidikan para pekerja sebagian besar masih di dominasi oleh tamatan sekolah dasar. Sebagai pekerja, kesempatan memperoleh pendidikan formal maupun non formal sangat terbatas dan bahkan dapat dikatakan cenderung jarang diberi kepada para pekerja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Padahal, setiap pekerja masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan minimal wajib belajar 9 tahun (minimal tamat SMP).

Siswo Wiratno (2009) bahwa sekitar 63,35% struktur tenaga kerja Indonesia berpendidikan SD dan secara keseluruhan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih tergolong rendah. Rendahnya titik pendidikan di Indonesia tercermin antara lain dari Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) tahun 2008 dimana Indonesia berada pada peringkat ke 109 dari 179 negara (nilai 0,726), dan peringkat tersebut terendah di Asia Tenggara (Anonim, HDI update 2008 Indonesia)

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, dimana disebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan”

Keputusan Menteri Sosial No.10 (2007), pekerja adalah seseorang yang mempunyai kompetensi professional dalam pekerjaan yang diperolehnya melalui

pendidikan formal atau pengalaman praktek dibidang pekerjaan yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas professional.

2.1.3 Penerimaan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96)

Pendapatan daerah harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat agar sedikit lebih berkurang. Dengan adanya kemandirian pengelolaan suatu pemerintahan, atau daerah otonom agar dituntut untuk mandiri dalam mengelolah perekonomian dengan baik dan dapat memenuhi segala kebutuhan belanja yang diperlukan oleh pemerintah dengan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerah.

Oleh sebab itu pemerintah daerah juga harus bijak dalam penggunaan anggaran belanja agar pembangunan daerah terlaksana dengan tepat untuk meningkatkan taraf serta kesejahteraan masyarakat. Adapun sumber-sumber penerimaan atau pendapatan daerah, adalah:

A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah

1.1 Pajak Daerah

1.2 Retribusi Daerah

1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan

1.4 Lain-lain PAD yang Sah

2. Dana Perimbangan

2.1 Bagi Hasil Pajak

2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam

2.3 Dana Alokasi Umum

2.4 Dana Alokasi Khusus

B. Pembiayaan Daerah

Pendapatan atau penerimaan daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika penerimaan daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih banyak dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat juga, sehingga pemerintah daerah akan memiliki kesempatan yang tinggi untuk membangun perekonomiannya (Tambunan, 2006 dalam Joliani, 2012)

2.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) secara paling sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan *output* atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu, misalkan satu tahun (Prasetyo, 2009).

Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian pengertian

pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Sadono Sukirno (2010), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya.

1. Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi

Faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi di era modern ini beragam. Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan (Adisasmita, Raharjo. 2013:103). Beberapa faktor produksi tersebut terdiri dari:

- a. Sumber Daya Alam merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
- b. Akumulasi Modal atau pembentukan modal adalah peningkatan stok modal dalam jangka waktu tertentu.
- c. Organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitasnya.

- d. Kemajuan Teknologi merupakan yang paling penting dalam pertumbuhan ekonomi yaitu untuk meningkatkan produktivitas, modal dan faktor produksi lainnya.
- e. Pembagian Kerja dan Skala Produksi, spesialisasi dan pembagian kerja menciptakan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar, yang selanjutnya membantu perkembangan industri.

2.1.5 Jumlah Penduduk

Menurut Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia mendefinisikan bahwa Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Penduduk merupakan faktor penting dalam sebuah kegiatan ekonomi untuk menjadi tenaga kerja, tenaga ahli dalam menciptakan kegiatan ekonomi akan tetapi dengan banyaknya jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan tingkat kegiatan perekonomian suatu daerah maka dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Seperti dalam teori konfusius membahas hubungan antara jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurutnya jumlah penduduk yang terlampau besar akan menekan standar hidup masyarakat, terutama jika jumlah penduduk dikaitkan dengan luas tanah atau lahan pertanian yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

A. Pertumbuhan Jumlah Penduduk

1. Kelahiran (fertilitas) merupakan tingkat kelahiran yang dialami oleh perempuan. Maksudnya, perempuan mempunyai masa siap reproduksi tertentu. di Indonesia masa reproduksi pada perempuan adalah umur 15 tahun sampai dengan 49 tahun.
2. Kematian (mortalitas) merupakan meninggalnya seseorang yang disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu: lanjut usia, bencana alam, penyakit kronis, peperangan, pembunuhan, virus mematikan, dan lain sebagainya.
3. Perpindahan (migrasi) merupakan keadaan dimana penduduk di suatu daerah pergi meninggalkan daerahnya dengan tujuan untuk merubah keadaan hidupnya. Migrasi dibagi kedalam beberapa jenis, yaitu:
 - Imigrasi adalah pindahnya penduduk dari Luar Negeri.
 - Emigrasi adalah pindahnya penduduk ke Luar Negeri.
 - Transmigrasi adalah pindahnya penduduk ke pulau lain dalam satu Negara.
 - Urbanisasi adalah pindahnya penduduk dari desa ke kota.

B. Teori Pertumbuhan Penduduk

Teori kependudukan meliputi jumlah dan perkembangan, pertumbuhan, persebaran, kepadatan, kualitas, serta mobilitas penduduk.

1. Jumlah dan Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk pada suatu wilayah atau daerah pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai suatu modal atau beban pembangunan yang mana hal ini bisa berdampak baik untuk negara jika disertai dengan kualitas yang memadai baik tingkat kesehatan, pendidikan, maupun kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi sangat mendukung terhadap proses pembangunan negara. Namun jika kondisi kualitas penduduknya kurang baik maka akan menjadi beban bagi pembangunan dan menjadi suatu hambatan bagi perputaran roda pertumbuhan ekonomi suatu negara.

2. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk selalu berubah dari waktu ke waktu. Namun terdapat beragam faktor yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk. Misalkan, wabah penyakit, atau epidemic, kelaparan, peperangan, dan bencana alam. Selain itu kestabilan negara, peningkatan gizi, dan kesehatan dapat mengakibatkan jumlah penduduk cenderung naik.

3. Sebaran Penduduk

Persebaran penduduk Indonesia tidak merata. Hal ini terlihat hampir 60% dari seluruh penduduk Indonesia tinggal di pulau Jawa dan Madura. Padahal, kedua pulau tersebut hanya memiliki luas kurang lebih 7% dari luas wilayah Indonesia. Maka hal itu akan berdampak pada berkurangnya lahan perekonomian akibat

dijadikan tempat tinggal oleh sekelompok orang yang tinggal diwilayah itu sendiri

4. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk yang bertempat tinggal di suatu daerah persatuan luas. Kepadatan penduduk di suatu wilayah dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan

$$\text{. Kepadatan penduduk} = \frac{\text{jumlah penduduk}}{\text{luas wilayah}}$$

Adapun dalam teori demografi ada dua kepadatan yang biasa dikenal dengan kepadatan penduduk fisiologis dan kepadatan penduduk agraris

a. Kepadatan penduduk fisiologis adalah perbandingan antara jumlah penduduk total dan luas lahan pertanian.

b. Kepadatan penduduk agraris adalah perbandingan antara jumlah penduduk petani dan luas lahan pertanian.

5. Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk adalah suatu penduduk yang memiliki tingkat kemampuan dan mampu memberikan kontribusi nyata untuk negara. Kualitas penduduk bisa dilihat dari fasilitas negara yang memfasilitasinya jika suatu negara mampu memberikan fasilitas yang baik terhadap penduduknya maka penduduknya akan mempunyai tingkat kualitas yang bagus namun sebaliknya jika fasilitas yang diberikan oleh negara tidak cukup untuk menampung

penduduk nya maka hal itu akan berdampak pada ketidak stabilan kualitas penduduk satu dengan yang lainnya. Sebab jika suatu wilayah mempunyai pasilitas yang baik namun di wilayah yang lain tidak baik maka aka nada perbedaan di antaranya.

6. Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk adalah gerakan (*movement*) penduduk yang melewati batas wilayah, dan dalam periode waktu tertentu. Batas wilayah tersebut umumnya digunakan batas administrasi seperti batas provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, atau desa (Mulyadi S, 2008:138). Menurut Badan Pusat Statistik dalam Mantra, (2008:172) seseorang disebut sebagai migran apabila orang tersebut bergerak melintasi batas provinsi menuju ke provinsi lain, dan lamanya tinggal di provinsi tujuan adalah enam bulan atau lebih, selain itu jika seseorang berada di provinsi tujuan kurang dari enam bulan tetapi orang tersebut berniat tinggal menetap atau tinggal enam bulan atau lebih di provinsi tujuan dinamakan juga sebagai migran.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fadllyyah Maulidah 2015 <i>“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan dan Konsumsi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur”</i>	Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan dan konsumsi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur baik secara parsial maupun simultan.	Variabel Terikat: Jumlah Penduduk Miskin Variabel Bebas: ❖ Tingkat Pendidikan ❖ Pendapatan ❖ Konsumsi Metode: Metode analisis menggunakan Teknik analisis regresi dan data panel.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Jawa Timur. Sedangkan pendapatan dan konsumsi berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Jawa Timur. Sedangkan secara simultan tingkat pendidikan, pendapatan, dan konsumsi berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Jawa Timur.
2	Hapsari Wiji Utami, Siti Umajah Masjkuri 2018 <i>“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pendidikan Terhadap Jumlah</i>	Tujuan penelitian ini diharapkan dapat menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka dan pendidikan (rata-rata lama	Variabel Terikat: Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur. Variabel Bebas: ❖ Pertumbuhan Ekonomi ❖ Upah Minimum ❖ Tingkat Pengangguran	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negative tetapi tidak signifikan terhadap tingkat jumlah penduduk miskin, variabel Upah Minimum berpengaruh negative signifikan terhadap jumlah penduduk miskin,

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>Penduduk Miskin”</i>	sekolah) terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur, sehingga nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam penentuan kebijakan dalam mengatasi masalah kemiskinan di Jawa Timur.	Terbuka ❖ Pendidikan (rata-rata lama sekolah) Metode: Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel dengan metode <i>FEM</i> dengan bantuan <i>software Eviews 6</i> .	variabel Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negative signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dan variabel Pendidikan (rata-rata lama sekolah) berpengaruh negative signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur.
3	Durrotul Mahsunah 2013 <i>“Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur”</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh parsial dan secara bersama-sama jumlah penduduk, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Timur.	Variabel terikat: Kemiskinan Variabel bebas: ❖ Jumlah Penduduk ❖ Pendidikan ❖ Pengangguran Metode: Metode analisis regresi berganda.	Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan. Untuk uji F terlihat ketiga variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat (kemiskinan).
4	Riko Tri Fasholla 2018 <i>“Pengaruh Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli daerah</i>	Penelitian ini bertujuan untuk, 1) Menganalisis pengaruh Belanja Daerah terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten	Variabel Terikat: Jumlah Kemiskinan Variabel Bebas: ❖ Belanja Daerah ❖ Jumlah Penduduk	Hasil penelitian menunjukkan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Jumlah Kemiskinan, Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Jumlah

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>Terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2011-2016</i>	Cilacap, 2) Menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap, 3) Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli daerah terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap, 4) Menganalisis pengaruh Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap.	❖ Pendapatan Asli daerah Metode: Menggunakan data panel yaitu gabungan antara data <i>time series</i> dan data <i>cross section</i> dari tahun 2011 hingga 2016.	Kemiskinan, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negative terhadap Jumlah Kemiskinan dan secara bersama-sama ketiga variabel Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap tahun 2011-2016.
5	Nur Ika Fitriyani dan Herniwati Retno Handayani 2020 <i>“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah terhadap Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016.	Variabel Terikat: Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016 Variabel Bebas: ❖ Pendapatan Asli Daerah (PAD) ❖ Dana Alokasi Khusus (DAK)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) paling sesuai. Berdasarkan hasil regresi penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif signifikan terhadap penurunan Angka Kemiskinan. Sedangkan Belanja Daerah berpengaruh negatif

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016</i>		❖ Belanja Daerah Metode: Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah regresi data gabungan.	dan tidak signifikan terhadap Angka Kemiskinan. Secara simultan Pendapatan Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.
6	Endang Rostiana dan Horas Djulius 2018 <i>“Micro, Small, and Medium Scale Industry as Means of Poverty Reduction”</i>	Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi tolok ukur perkembangan industri kecil dan membuat pemetaan faktor-faktor yang menghasilkan pengurangan kemiskinan.	Variabel Terikat: Tingkat Kemiskinan Variabel Bebas: ❖ Perkembangan UKM yang diukur dengan jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja, nilai output ❖ Nilai investasi Metode: Diagram pencar digunakan untuk menggambarkan hubungan antara perkembangan UKM dengan kemiskinan di Indonesia dan Provinsi Jawa Barat.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara perkembangan UKM yang diukur dengan jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja, nilai output, dan nilai investasi dengan perkembangan tingkat kemiskinan yang diukur dengan persentase penduduk miskin baik secara nasional dan Provinsi Jawa Barat.
7	Saharuddin Didu, Ferri	Penelitian ini bertujuan	Variabel Terikat:	Hasil analisis regresi, variabel

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Fauzi 2016 "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lebak"	untuk menganalisis pengaruh dari jumlah penduduk, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di kabupaten lebak dalam periode 2003 sampai 2012.	Kemiskinan Variabel Bebas: ❖ Jumlah Penduduk ❖ Pendidikan ❖ Pertumbuhan Ekonomi Metode: Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda OLS.	populasi, variabel pendidikan dan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten Lebak. Secara simultan, ketiga variabel independen mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten Lebak. Selanjutnya, koefisien R kuadrat menunjukkan nilai 0,947 atau 94,7% yang berarti bahwa variasi kemiskinan di kabupaten Lebak dapat dijelaskan oleh ketiga independen variabel tersebut.
8	I Putu Arya Finkayana, Made Heny Urmila Dewi 2016 "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Komposit IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2004-2013"	Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, dapat ditempuh dengan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada sumberdaya alam dan SDM masing-masing kabupaten/kota di Bali.	Variabel Terikat: Jumlah Penduduk Miskin Variabel Bebas: ❖ Pertumbuhan Ekonomi ❖ Indikator Komposit IPM Metode: Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.	Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, rata – rata lama sekolah, angka melek huruf dan pengeluaran perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali.

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
9	Novi Astika Sari, Ketut Suardikha Natha 2016 <i>“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, dan Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Periode 1999-2013”</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, dan Inflasi secara simultan dan parsial terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Periode 1999-2013.	Variabel Terikat: ❖ Jumlah Penduduk Miskin Variabel Bebas: ❖ Pertumbuhan Ekonomi ❖ Pertumbuhan Penduduk ❖ Inflasi Metode: Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.	Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali periode 1999-2013, pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali periode 1999-2013, inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali periode 1999-2013 dan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, inflasi secara simultan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali periode 1999-2013.
10	Candra Mustika 2011 <i>“Pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 1990-2008”</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penduduk, pertumbuhan ekonomi serta jumlah penduduk miskin di Indonesia kurun waktu 1990-2008.	Variabel Terikat: Jumlah Penduduk Miskin Variabel Bebas: ❖ Pertumbuhan Ekonomi ❖ Pertumbuhan Penduduk Metode:	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia selama periode 1990 sampai 2008 terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 1995 sebesar 8,57 % dan

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			Metode analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis Regresi Linear Berganda	terendah pada tahun 2005 sebesar 0,47 %. Sedangkan jumlah penduduk miskin cenderung berfluktuasi dan berdasarkan indeks keparahan ternyata wilayah pedesaan cenderung mengalami tingkat kemiskinan yang lebih parah dari perkotaan. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel PDB dan Variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Untuk uji F terlihat kedua variabel independen secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen (tingkat kemiskinan). Sedangkan nilai R ² sebesar 59,75 persen. artinya kemampuan model menjelaskan variabel dependen sebesar angka tersebut, sisanya sebesar 40,25 persen di jelaskan oleh variabel lain.

2.3 Kerangka Pemikiran

Variabel Jumlah Penduduk Miskin (JPM) menjadi variabel terikat pada penelitian ini pada 34 Provinsi di Indonesia periode Tahun 2011-2020. Dalam penelitian ini digunakan data panel yaitu gabungan antara data *cross section* untuk menghitung 33 Provinsi di Indonesia dan data *time series* untuk menghitung periode waktu penelitian tersebut yaitu 2011-2020. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana individu atau kelompok tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, kebebasan, asset, dan aksesibilitas untuk kebutuhan diwaktu yang akan datang, serta sangat rentan terhadap resiko dan tekanan yang disebabkan oleh penyakit.

Setelah itu maka akan menghitung faktor-faktor atau variabel bebas yang akan mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin (JPM) di 33 Provinsi Indonesia pada Tahun 2011-2020. Berikut variabel yang diprediksi memiliki pengaruh terhadap Kemiskinan, yaitu:

1. Jumlah Pekerja Berpendidikan SMA Keatas

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, dimana disebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan”

2. Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah di setiap daerah berbeda-beda, daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam

yang melimpah cenderung memiliki penerimaan daerah jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya.

Setiap tempat daerah yang memiliki penerimaan daerah yang tinggi biasanya memiliki lapangan pekerjaan yang luas bagi para penduduk di daerah tersebut, dan begitu juga bagi daerah yang memiliki penerimaan daerah yang rendah biasanya terjadi keterbatasan lapangan kerja. Lapangan pekerjaan tersebut biasanya muncul dikarenakan banyaknya lahan industri serta lahan kekayaan alam pada suatu daerah. Sehingga penerimaan daerah dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di 33 provinsi Indonesia.

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Menurut Sadono Sukirno (2010), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat penambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya.

4. Jumlah Penduduk

Dalam BPS, Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan

atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Pada penelitian ini data jumlah penduduk yang digunakan merupakan jumlah penduduk menurut Provinsi di Indonesia. Data jumlah penduduk juga memiliki satuan orang yang memang terdata di wilayah tersebut.

Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 (satu) tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Dalam pertumbuhan penduduk terdapat 3 faktor yang mendorong pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah, antara lain :

- A. Fertilitas, yaitu jumlah bayi yang dilahirkan oleh seorang Wanita.
- B. Mortalitas, yaitu seseorang yang tidak memiliki tanda-tanda kehidupan yaitu bernafas dalam dirinya.
- C. Migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain.

Tingkat pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan dampak yang sangat luas apalagi jika perubahan jumlah penduduk yang terjadi cenderung berdampak negative. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi oleh sarana dan prasarana yang memadai. Tingkat pertumbuhan penduduk yang sedang berkembang menyebabkan proporsi penduduk yang belum dewasa

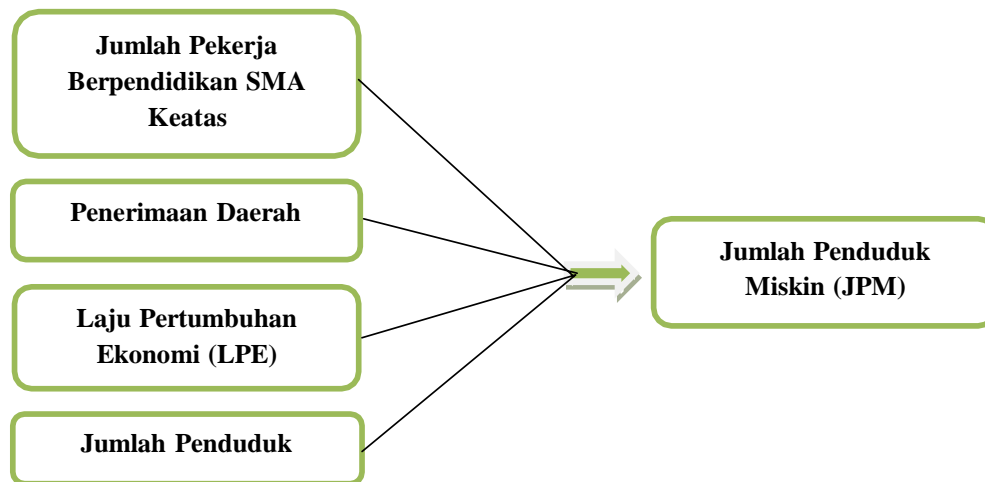
menjadi bertambah tinggi dan jumlah anggota keluarga bertambah besar.

Akibatnya angka beban tanggungan (*burden of dependency ratio*), perbandingan antara orang-orang yang belum atau tidak sanggup bekerja dengan orang-orang yang ada dalam batas umur turut serta dalam proses produksi. *Dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Secara tidak langsung dengan tingginya *dependency ratio* yang terjadi tidak diimbangi dengan persediaan lapangan pekerjaan maka akan berdampak pada kemiskinan disebabkan oleh jumlah penduduk yang tinggi.

Jadi hubungan antara jumlah penduduk ini merupakan indikator yang berkaitan dengan kemiskinan karena data yang tercantum meliputi dari seluruh lapisan masyarakat mulai dari yang berpenghasilan tinggi hingga yang berpenghasilan rendah bahkan pengangguran. Tidak hanya itu, jumlah penduduk juga terdiri dari berbagai kalangan umur di masyarakat mulai dari yang baru lahir ataupun yang sudah lanjut usia. Sehingga jumlah penduduk dapat mempengaruhi suatu kebutuhan masyarakat sebagai tanggungan bagi orang lain yang mencari penghasilan.

Berdasarkan kajian studi pustaka dan penelitian terdahulu menyatakan bahwa jumlah pekerja berpendidikan SMA keatas,

penerimaan daerah, laju pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk mempengaruhi jumlah penduduk miskin.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis yang digunakan merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Pekerja Berpendidikan SMA ke atas diduga berpengaruh negatif terhadap Jumlah Penduduk Miskin di 34 provinsi Indonesia pada periode 2011-2020.
2. Penerimaan Daerah diduga berpengaruh negatif terhadap Jumlah Penduduk Miskin di 34 provinsi Indonesia pada periode 2011-2020.

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) diduga berpengaruh negatif terhadap Jumlah Penduduk Miskin di 34 provinsi Indonesia pada periode 2011-2020.
4. Jumlah Penduduk diduga berpengaruh positif terhadap Jumlah Penduduk Miskin di 34 provinsi Indonesia pada periode 2011-2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu suatu proses penggunaan data berupa angka untuk menemukan pengetahuan sebagai alat menganalisis keterangan yang ingin diketahui (Kasiram, 2008). Lalu penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menguji hipotesis dari hubungan variabel yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel terikat yaitu jumlah penduduk miskin (JPM) dengan variabel bebas yaitu jumlah pekerja berpendidikan SMA keatas (JPBSK), penerimaan daerah (PD), laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dan jumlah penduduk (JP).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk data panel. Data panel ini yaitu gabungan antara data *time series* dan *cross section*. *Data time series* penelitian ini menggunakan periode waktu 10 tahun yaitu dari tahun 2011-2020. *Data cross section* untuk menghitung 34 provinsi di Indonesia.

Menurut Gujarati (2004) keunggulan data panel dibandingkan dengan *time series* dan *cross section* adalah:

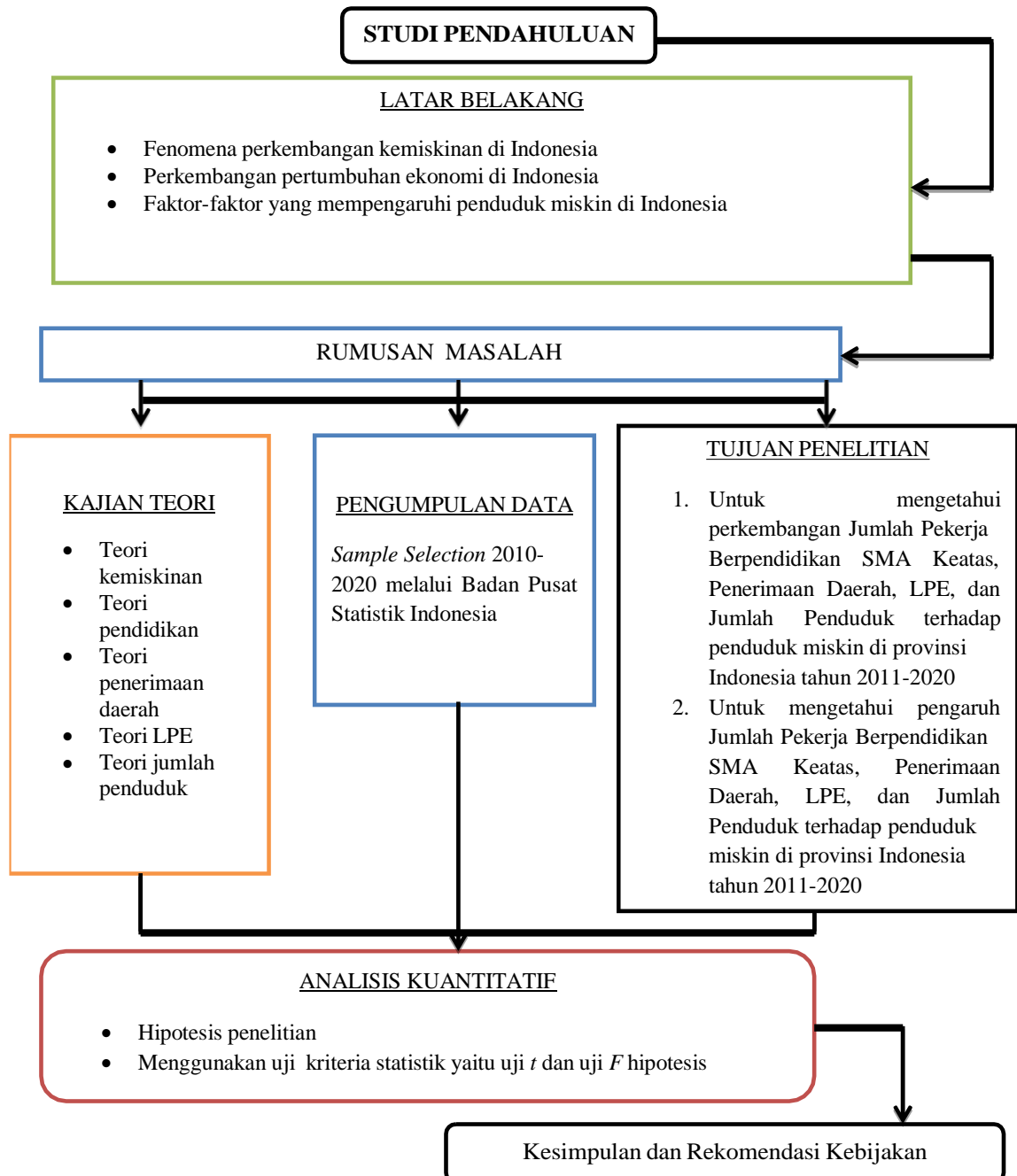
1. Data panel dapat meminimalkan bias.
2. Memberikan informasi yang lebih banyak, variabilitas yang lebih baik, mengurangi hubungan antara variable independent, dan lebih efisien.

3. Data panel dapat mendeteksi dan mengukur efek yang tidak bisa dilakukan oleh data *time series* dan *cross section*.
4. Data panel memungkinkan peneliti untuk mempelajari model perilaku yang lebih kompleks.
5. Teknik estimasi menggunakan data panel akan menghasilkan keanekaragaman secara tegas dalam perhitungan dengan melibatkan variabel-variabel individual secara spesifik.
6. Data panel lebih cocok digunakan jika akan melakukan studi tentang perubahan dinamis.

Model regresi dengan data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan metode estimasi yaitu *Common Effect*, *Fixed Effects (FE)*, dan *Random Effects*.

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian pada yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan 5 (lima) variabel penelitian, yaitu Jumlah Penduduk Miskin (Y), Jumlah Pekerja Berpendidikan SMA Keatas (X1), Penerimaan Daerah (X2), Laju Pertumbuhan Ekonomi (X3), dan Jumlah Penduduk (X4). Penjelasan lebih rinci definisi operasional serta kaitannya dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Operasional Variabel

No.	Jenis Variabel	Nama Variabel	Definisi Operasional Variabel	Satuan
1.	<i>Dependen</i>	Jumlah Penduduk Miskin (Y)	Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.	Ribu Jiwa/Tahun
2.	<i>Independen</i>	Jumlah Pekerja Berpendidikan SMA Keatas (X ₁)	Setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain, dengan pendidikan SMA keatas menurut masing-masing provinsi di Indonesia tahun 2011-2020.	Jiwa/Tahun
3.	<i>Independen</i>	Penerimaan Daerah (X ₂)	Penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah menurut	Juta Rupiah/Tahun

No.	Jenis Variabel	Nama Variabel	Definisi Operasional Variabel	Satuan
			masing-masing provinsi di Indonesia tahun 2011-2020.	
4.	<i>Independen</i>	Laju Pertumbuhan Ekonomi (X_3)	Pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun untuk menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan menurut masing-masing provinsi Indonesia tahun 2011-2020.	Persen/Tahun
5.	<i>Independen</i>	Jumlah Penduduk (X_4)	Semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih menurut masing-masing provinsi di Indonesia tahun 2011-2020.	Ribu Jiwa/Tahun

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang terdapat pada penelitian ini berupa angka dan didapatkan dari hasil publikasi literatur yang ada di Badan Pusat Statistik yang berkaitan dengan kemiskinan. Informasi lain bersumber dari jurnal ilmiah yang relevan dan dari buku-buku ekonomi.

3.5 Metode Analisis dan Pengumpulan Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan analisis deskriptif. Analisis kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan suatu fenomena. Kemudian, analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis faktor faktor kemiskinan di tiap provinsi di Indonesia.

Untuk menganalisis faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi penduduk miskin di tiap provinsi di Indonesia menggunakan analisis data panel. Data panel merupakan analisis yang menggabungkan antara data *cross section* dan *time series*. Data *cross section* merupakan data yang dikumpulkan dalam waktu tertentu dengan banyaknya objek. Sedangkan data *time series* merupakan data yang dikumpulkan dari beberapa waktu terhadap suatu objek. Kelebihan dari menggunakan analisis data panel adalah peneliti dapat menggabungkan data *cross section* dan *time series* dalam satu penelitian. Kemudian dengan menggunakan analisis data panel mengurangi masalah identifikasi. Data panel memberikan banyak keuntungan secara statistik maupun teori ekonomi.

- Model data panel dengan menggunakan *time series* yaitu:

$$Y_t = Q_0 + Q_1X_t + \mu_t ; t = 1, 2, \dots$$

Dimana (T) merupakan banyaknya data *time series*.

➤ Model data panel yang menggunakan data *cross section* yaitu:

$$Y_t = Q_0 + Q_1X_i + \mu_i ; i = 1, 2, \dots n$$

Dimana (N) merupakan banyaknya data *cross section*.

Karena data panel merupakan gabungan antara *time series* dan *cross section*, maka model persamaan dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = Q_0 + Q_1X_{it} + \mu_{it}$$

3.6 Model Persamaan Regresi

Model penelitian dalam penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi faktor ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data *time series* selama 10 tahun yaitu 2010-2020 dan *cross section* sebanyak 34 data pada Provinsi di Indonesia. Berikut adalah model yang akan digunakan dalam penelitian ini:

$$JPM_{it} = Q_0 + Q_1JPBSK_{it} + Q_2PD_{it} + Q_3LPE_{it} + Q_4JP_{it} + S_{it}$$

Keterangan :

JPM : Jumlah Penduduk Miskin di 34 Provinsi Indonesia

JPBSK : Jumlah Pekerja Berpendidikan SMA ke atas

PD : Penerimaan Daerah

LPE : Laju Pertumbuhan Ekonomi

JP : Jumlah Penduduk

- i : Data *Cross Section* Provinsi ke- i (34 Provinsi)
- t : Data *Time Series* Tahun (2011-2020)
- β : Koefisien
- $\beta_{1,2,3,4}$: Koefisien variabel bebas

Penentuan dari model data panel diatas dilandasi beberapa asumsi dasar. Asumsi dasar ini dari kondisi variabel bebas yang digunakan dalam model data panel tersebut. Penelitian data panel menggunakan estimasi 3 pendekatan yaitu:

1. *Common Effect Model*

Common effect model merupakan pendekatan dengan mengestimasi data panel yang mengkolaborasikan antara *data time series* dan *cross section* dengan model estimasi menggunakan metode *Ordinary Least Square* dengan menggambarkan dampak dari variabel *independent* pada penelitian. Kelemahan dari model ini adalah penyimpangan atau ketidaksesuaian kondisi yang sebenarnya terjadi karena kondisi setiap objek pada suatu waktu tidak sama dengan waktu lainnya. Sehingga menyebabkan persamaan regresi yang sama di setiap data *cross section*.

2. *Fixed Effect Model*

Fixed effect model ini adalah model pendekatan yang menggunakan *dummy variabel* untuk kemungkinan-kemungkinan perubahan yang ada dalam intersep akibat dari adanya perubahan-perubahan pada data

cross section dan data *time series*. Model pendekatan ini dapat digunakan untuk menganalisis perbedaan yang ada pada antar objek penelitian. Kelemahan dari model ini adalah dapat mengurangi derajat kebebasan dan menggunakan *dummy variabel* secara tidak langsung sehingga menyebabkan regresi bergeser secara lintas waktu dan lintas individu.

3. *Random Effect Model*

Estimasi menggunakan model *Random effect* dianggap tepat untuk penelitian yang menggunakan data panel yang diduga setiap variabelnya memiliki pengaruh antar waktu dan objek penelitian (Kuncoro, 2012). Seperti yang sudah di singgung diatas menggunakan *dummy varriabel* pada model *fixed effect* akan menyebabkan berkurangnya derajat kebebasan yang mengakibatkan berkurangnya efisiensi parameter namun model *random effect* dapat mengatasi kelemahan yang ada pada model *fixed effect* sehingga hasil estimasi pada model ini akan menjadi lebih efisien. Model ini mengasumsikan bahwa adanya perbedaan pada nilai intersep antar unit pada data *cross section* dapat dimasukkan kedalam error.

3.7 Pengujian Kesesuaian Model Data Panel

Untuk pemilihan model estimasi terbaik data panel dapat dilakukan beberapa uji yaitu Uji Chow, Uji LM dan Uji Hausman.

1. Uji chow atau Uji F

Tujuan dari Uji Chow ini adalah mencari model mana yang tepat dan bisa digunakan dalam penelitian yang menggunakan data panel dengan pengujian signifikansi dan memilih antara model *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*, cukup dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Model Common Effect}$$

$$H_1 = \text{Model Fixed Effect}$$

Kriteria perhitungannya sebagai berikut:

- 1) Jika $F \text{ stat} < F \text{ table}$ maka H_1 diterima maka dari itu model yang tepat digunakan adalah model *fixed effect*.
- 2) Jika $F \text{ stat} > F \text{ table}$ maka H_1 ditolak maka dari itu model yang tepat digunakan adalah model *common effect*.

2. Uji Hausman

Uji Hausman adalah test untuk memilih model mana yang tepat dan bisa digunakan dalam penelitian yang menggunakan data panel dengan pengujian signifikansi dan memilih antara model *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Uji Hausman memiliki hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Model Fixed Effect}$$

$$H_1 = \text{Model Random Effect}$$

Kriteria perhitungannya sebagai berikut:

- 1) Jika $P \text{ value} > 0,05$ maka H_0 ditolak maka model yang tepat untuk digunakan adalah *Random Effect*.

- 2) Jika P value $< 0,05$ maka H_1 diterima model yang tepat untuk digunakan adalah *Fixed Effect*.

3. Uji LM

Uji LM adalah test untuk memilih model yang tepat diantara model *Common Effect Model* dan *Random Effect Model*. Uji LM menggunakan pendekatan dengan uji *chi-square*. Dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 = Model\ Common\ Effect$

$H_1 = Model\ Random\ Effect$

Kriteria perhitungannya sebagai berikut:

- 1) Jika nilai probability $F > a = 5\%$ maka H_0 di tolak maka model yang tepat untuk digunakan adalah *Random Effect*.
- 2) Jika nilai probability $F < a = 5\%$ maka H_0 di terima maka model yang tepat untuk digunakan adalah *Common Effect*.

3.8 Pengujian Asumsi Klasik

3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian sebelum melakukan analisis data pada sebuah penelitian. Uji normalitas dilakukan untuk menganalisis data dalam suatu variabel pada penelitian. Untuk mengetahui ada atau tidaknya normalitas pada data yang akan diteliti menggunakan uji Jarque-Bera. Ketika nilai dari probabilitas Jarque-Bera lebih besar dari nilai dari taraf nyata (α) maka data dikatakan tidak memiliki masalah pada normalitas.

3.8.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memastikan apakah ada hubungan yang linear atau hubungan yang kuat antar variabel bebas. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari koefisien masing-masing variabel bebas. Jika koefisien kolerasi diantara masing-masing variabel bebas lebih dari 0,8 maka terjadi multikolinearitas dan sebaliknya. Jika koefisien kolerasi antara masing-masing variabel bebas kurang dari 0,8 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hipotesis yang digunakan dalam uji multikolinearitas yaitu:

H_0 = Tidak terdapat multikolinearitas

H_1 = Terdapat multikolinearitas

Melalui pengujian kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika nilai koefisien kolerasi $> 0,8$ maka H_0 ditolak, artinya terdapat multikolinearitas.
- 2) Jika nilai koefisien kolerasi $< 0,8$ maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat multikolinearitas.

3.8.3 Uji Heteroskedastitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model pengamatan terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka dapat dikatakan homokedastisitas yang merupakan syarat suatu model regresi. Hipotesis dalam uji heteroskedastisitas yaitu:

H_0 = Tidak terdapat heteroskedastisitas

H_1 = Terdapat heteroskedastisitas

Melalui pengujian kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika P value $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya terdapat heteroskedastisitas.
- 2) Jika P value $\geq 0,05$ maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat heteroskedastisitas.

3.8.4 Uji Autokolerasi

Salah satu asumsi model regresi linier adalah tidak adanya autokolerasi. Autokorelasi adalah korelasi antara sesama urutan pengamatan dari waktu ke waktu. Tujuan dari uji autokorelasi ini adalah untuk menguji apakah dalam suatu regresi linier ada kolerasi antara residual pada periode t dengan periode t-1. Jika terjadi autokolerasi maka dalam persamaan regresi linier tersebut terdapat masalah, karena hasil yang baik seharusnya tidak ada indikasi autokorelasi. Untuk memeriksa adanya auto korelasi biasanya menggunakan metode *Durbin Weston* (DW) dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Tidak ada autokorelasi

H_1 = Terdapat autokolerasi

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat dilihat dari nilai DW dan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika $d < d_L$, maka H_0 ditolak: artinya terdapat serial korelasi positif antar variabel.
- 2) Jika $d > d_L$, maka H_0 diterima: artinya terdapat serial korelasi negatif antar variabel.
- 3) Jika $d_u < d < 4-d_u$, maka H_0 diterima: artinya tidak terdapat serial korelasi positif maupun negative antar variabel.
- 4) Jika $d_L < d < d_u$ atau $4-d_u < d < 4-d_L$: artinya tidak dapat diambil kesimpulan, maka pengujian dianggap tidak meyakinkan.

3.9 Pengujian Statistik

3.9.1 Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel *independen* secara individu terhadap variabel *dependen*. Uji t ini merupakan pengujian koefisien regresi masing-masing variabel *independen* terhadap variabel *dependen* untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen*.

Perumusan hipotesis statistik, antara hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1) selalu berpasangan, bila salah satu ditolak maka yang lain pasti diterima sehingga dapat dibuat keputusan yang tegas, yaitu apabila H_0 ditolak pasti H_1 diterima (Sugiyono, 2018:87). Untuk menguji pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen* dapat dibuat hipotesa:

H_0 = Tidak ada pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

H_1 = Ada pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) t-statistik < t-tabel: artinya hipotesa nol (H_0) diterima dan hipotesa alternatif (H_1) ditolak yang menyatakan bahwa variabel *independen* secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel *dependen*.
- 2) t-statistik > t-tabel: artinya hipotesa nol (H_0) ditolak dan hipotesa alternatif (H_1) diterima yang menyatakan bahwa variabel *independen* secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel *dependen*.

3.9.2 Uji Statistik F

Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel *independen* bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel *dependen*. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan derajat signifikan nilai F.

H_0 = Secara bersama-sama variabel *independen* tidak berpengaruh terhadap variabel *dependen*.

H_1 = Secara bersama-sama variabel *independen* berpengaruh terhadap variabel *dependen*.

Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) $F \text{ statistik} < F \text{ tabel}$: artinya hipotesa nol (H_0) diterima dan hipotesa alternatif (H_1) ditolak yang menyatakan bahwa variabel *independen* secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel *dependen*.
- 2) $F \text{ statistik} > F \text{ table}$: artinya hipotesa nol (H_0) ditolak dan hipotesa alternatif (H_1) diterima yang menyatakan bahwa variabel *independen* secara bersama mempunyai pengaruh terhadap variabel *dependen*.

3.9.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel *dependen*. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel *independen* dalam menjelaskan variasi variabel *dependen* amat terbatas. Sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel *independen* memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel *dependent*.

